

**PELAKSANAAN PROGRAM ELEKTRONIK WARONG KUBE PKH
DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU
TAHUN 2017**

Oleh : Faisal Aula

Faisalaula12@yahoo.com

Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The target of government policy is to improve the lives of the people, who are oriented towards increasing the income of the community, especially those who have economic limitations. Based on the Republic of Indonesia's Minister of Social Affairs Regulation No. 25 of 2016 concerning Business Facility Development Assistance through Electronic Warong Gotong Royong Joint Business Group the Hope Family Program states that the establishment of PKH KUBE e-Warong aims to improve the welfare of beneficiary families. The problems in this research are: First, how is the implementation of PKH's Warong KUBE Electronic Program in Pekanbaru's Rumbai Pesisir District in 2017. Second, what are the factors that hinder the implementation of PKH's Warong KUBE Electronic Program in Pekanbaru's Rumbai Pesisir District in 2017. As for the purpose of this paper, namely: First, To find out the implementation of the PKH Electronic Warong KUBE program in Pekanbaru City Rumbai Pesisir District in 2017. Secondly, To find out the factors that hinder the implementation of PKH Warong KUBE Electronic program in Pekanbaru Rumbai Pesisir District in 2017. This research is qualitative research. This research was conducted in the District of Rumbai Pesisir. The techniques used to collect data in this study are (1) Observation, (2) Interview, and (3) Documentation. The conclusions of this study indicate that the electronic implementation of PKH Warong KUBE at the Pekanbaru City Social Service has not been optimal, which is evidenced by the lack of human resources in the escort section, and there is a lack of funds in the implementation team that descends on the field. Based on the results of the research that the researchers have done, the authors make suggestions that the Prosperous Indonesian Community Cooperatives (KMIS) can be formed so that the input of food in e-Warong can be easily controlled, regaining the poor in each region, the community is wiser in utilizing assistance given so that the benefits of the program can be felt in the long term.

Key Words: Implementation, e-Warong KUBE PKH, Program.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu pemerintah Provinsi Riau harus terus menggalakkan program yang bisa mengentaskan kemiskinan, dengan Pelaksanaan Program-Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 154 yang berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan.

Agenda Nasional Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha Desa/Kelurahan. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan

mengadakan proses pembangunan yang partisipatif dan gotong royong.

Salah satu wilayah di Indonesia yang melaksanakan program e Warong KUBE PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program E Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru ini dilaksanakan diseluruh Kecamatan di Kota Pekanbaru. Berikut ini merupakan data pelaksanaan program E Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru, yaitu:

Tabel 1.1
Program Bantuan Dana E-Warong di Kota Pekanbaru Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah KK	Bantuan Dana KK/Bulan	Jumlah Dana/Bulan	Jumlah Dana/Tahun
Bukit Raya	1352	Rp. 110.000	Rp.148.720.000	Rp.1.784.640.000
Limapuluh	804	Rp. 110.000	Rp.88.440.000	Rp.1.061.280.000
Marpoyan Damai	2299	Rp. 110.000	Rp.252.890.000	Rp.3.034.680.000
Payung Sekaki	1496	Rp. 110.000	Rp.164.560.000	Rp.1.974.720.000
Pekanbaru Kota	753	Rp. 110.000	Rp.82.830.000	Rp.993.960.000
Rumbai	2626	Rp. 110.000	Rp.288.860.000	Rp.3.466.320.000
Rumbai Pesisir	2133	Rp. 110.000	Rp.234.630.000	Rp.2.815.560.000
Sail	423	Rp. 110.000	Rp.46.530.000	Rp.558.360.000
Senapelan	1146	Rp. 110.000	Rp.126.060.000	Rp.1.512.720.000
Sukajadi	1050	Rp. 110.000	Rp.115.500.000	Rp.1.386.000.000
Tampan	2486	Rp. 110.000	Rp.273.460.000	Rp.3.281.520.000
Tenayan Raya	3900	Rp. 110.000	Rp.429.000.000	Rp.9.438.000.000
UMLAH TOTAL	20.467	Rp. 1.320.000	Rp. 2.168.650.000	Rp.31.307.760.000

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2017.

Dalam pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru maka setelah dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun terdapat program yang telah berjalan baik di Kecamatan dan ada juga program Elektronik Warong KUBE PKH yang belum berjalan. Berikut ini merupakan data mengenai program Elektronik Warong KUBE PKH yang telah berjalan di Kota Pekanbaru, yaitu:

Tabel 1.2
Daftar E-Warong Aktif Di Kota
Pekanbaru

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama E Warong
1	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	Rawa Bening Harapan
2	Payung Sekaki	Tampian	Berkah Bersama
3	Senapelan	Padang Terubuk	Cahaya Dini
4	Tenayan Raya	Rejosari	Marwah Hangtuah
5	Tenayan Raya	Kulim	Serantau Madani
6	Tenayan Raya	Kulim	Sialang Rampai
7	Tenayan Raya	Tangkerang Timur	Harapan Sejahtera
8	Marpoyan Damai	Tangkerang Barat	Abidin Sejahtera
9	Marpoyan Damai	Maharatu	Berkah Harapan
10	Sukajadi	Pulau Karam	Mutiara Baroqah
11	Tampian	Sidomulyo Barat	Lancang Kuning Sejahtera
12	Tampian	Delima	Rajawali
13	Tampian	Simpang Baru	Ketitiran
14	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	Kayu Aro
15	Rumbai Pesisir	Lembah Damai	Damai Sejahtera
16	Rumbai Pesisir	Limbungan	Pesisir Sejahtera
17	Sail	Suka Maju	Membawa Baroqah
18	Suka Jadi	Pulau Karam	Mutiara Berqah
19	Bukit Raya	Simpang Tiga	Mulia Sejahtera
20	Lima Puluh	Tanjung Rhu	Berkah Sejahtera
21	Pekanbaru Kota	Kota Baru	Kartini
22	Rumbai	Palas	Teratai
23	Rumbai	Sri Meranti	Rumbai Sejahtera
24	Rumbai	Rumbai Bukit	Hang Nadim Sejahtera

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2017

Selain itu dalam pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru tahun 2017 juga terdapat Warong yang belum aktif, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Daftar E-Warong yang belum aktif di
Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Kel.	e-Warong
1	Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Darusalam Sejahtera
2	Marpoyan Damai	Tangkerang Tengah	Dakota Yakin
3	Lima Puluh	Rintis	Kuberintis Berseri
4	Tenayan Raya	Sail	Sukses Mandiri
5	Sahabat Kita	Sekip	Sahabat Kita

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan data diatas, maka salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah pengguna E Warong di Kota

Pekanbaru akan tetapi Warong yang telah dimaksudkan untuk bekerjasama belum aktif adalah Kecamatan Rumbai Pesisir sehingga dalam pelaksanaannya program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru masih belum terlaksana secara efektif.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yang relevan dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut: **“Pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tahun 2017?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tahun 2017?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tahun 2017.
2. Menganalisa mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tahun 2017.

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta dapat menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
2. Secara praktis, penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menambah pengetahuan yang berguna dalam memperluas khazanah ilmu pengetahuan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti bermaksud untuk memberi dasar yang kuat pada penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti memaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dan dianggap dapat mendukung penelitian ini. Pada kajian tentang peneliti terdahulu akan dipaparkan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang ada relevansinya dengan penelitian mengenai Pelaksanaan Program Elektronik. Relevansi dapat dilihat baik konteks penelitian maupun metode penelitian yang digunakan untuk menjadi sumber referensi yang menunjang pengembangan penelitian. Tabel berikut adalah kajian terhadap hasil penelitian terdahulu.

2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Dalam merumuskan suatu kebijakan diperlukan adanya model kebijakan sebagai suatu patokan dalam menyusun suatu kebijakan, adapun model yang dipakai adalah Model Grindle. Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Adapun content atau isi dari sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik dipengaruhi oleh faktor yang mencakup: (Samodra Wibawa. 1994 Hlm 21).

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. (siapa) pelaksana program.
6. Sumber daya yang dikerjakan.

Sedangkan dalam bentuk variabel lainnya menurut Grindle adalah lingkungan atau konteks implementasi dari sebuah program. Adapun indikator yang berpengaruh dalam lingkungan kebijakan adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

2.3 Kebijakan

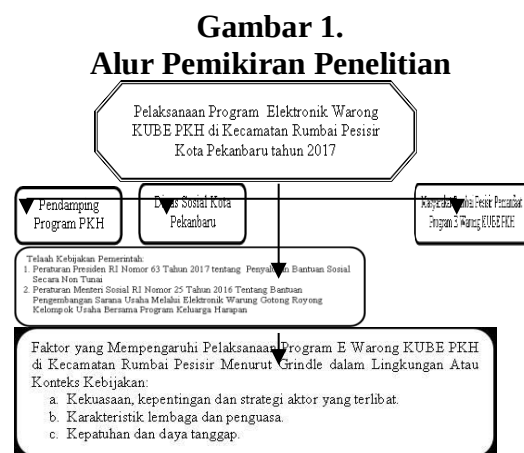
Dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan, setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta berusaha menjalankan kewajiban sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang mereka anut. Fungsi-fungsi manajemen akan mengarahkan organisasi pada suatu hasil yang terukur. Salah satu ukuran yang akan tampak adalah dengan melihat sejauh mana implementasi yang terwujud dari proses pencapaian tujuan.

Pengertian mengenai kebijakan dikemukakan pula oleh M. Irfan Islamy yang mengutip pendapat dari Anderson, yaitu serangkaian tindakan yang

mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecah suatu masalah tertentu (M. Irfan Islamy, 1997. Hlm17).

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan Penelitian 2018

2.5 Metode Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ini merupakan sebuah penelitian kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan fakta. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti lapangan. Teori juga dapat lahir dan dikembangkan lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi teori yang timbul lapangan. Proses penelitian kualitatif menggunakan suatu periode dan

dilakukan berulang-ulang untuk mengungkap secara cermat dan lengkap keadaan yang sesungguhnya, Muslimin (2002:2). Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah karna Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian-penelitian eksploratif dan studi kasus. Selain itu pendekatan ini lebih sesuai dengan tipe-tipe informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu Pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, Mardalis (2010:26). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskriptifkan suatu keadaan yang sebenarnya Satori dan Komariah (2010:39). Menurut tingkat penjelasannya, teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau fakta tentang Pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tahun 2017.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ini diadakan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kecamatan Rumbai Pesisir dipilih dikarenakan berdasarkan data yang dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu

Kecamatan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah masyarakat penerima bantuan program E Warong KUBE PKH yang besar akan tetapi besarnya jumlah penerima program E Warong KUBE PKH ini tidak diiringi dengan keaktifan Warong yang telah ditunjuk di kelurahan setiap Kecamatan sehingga program E Warong di Kecamatan Rumbai Pesisir belum terlaksana secara optimal.

2.6 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dalam pelaksanaan observasi serta wawancara langsung kepada informan terkait dengan pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Adapun data primer penelitian ini adalah:

1. Kebijakan dan program Kementerian Sosial dalam pengentasan fakir miskin melalui program E Warong di Kecamatan Rumbai Pesisir Kecamatan Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir.
3. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh atau yang berkaitan dengan tupoksi, sarana dan prasarana Dinas Sosial Kota. Data sekunder terdiri atas:

1. Data Peraturan Menteri Sosial terkait program Elektronik Warong KUBE PKH.

2. Tugas pokok, kedudukan dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
3. Laporan kegiatan pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru.
4. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel dan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

2.7 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mengenai pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru berasal dari beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara informan penelitian,
2. Observasi atau pengamatan secara langsung,
3. Dokumentasi berupa rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Bengkalis,
4. Buku serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2.8 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ini dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam melakukan pengamatan secara langsung atau observation, penulis berada di lokasi penelitian di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan mengamati secara teliti dan seksama keadaan yang

sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penelitian.

2. Teknik Interview atau Wawancara

Dalam melakukan interview atau wawancara ini, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi untuk mengetahui pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Teknik pengambilan informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling technique. Purposive sampling technique adalah cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan tersebut.

Tabel 1.4 Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1 orang
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1 orang
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin	1 orang
4	Ketua Kelompok E Warong	1 orang
5	Pendamping Sosial PKH Kecamatan Rumbai Pesisir	2 orang
6	Masyarakat Pemanfaat Program E Warong	3 orang
	Jumlah	9 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian. Tahun 2018

2.9 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi, pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, seperti Peraturan Bupati Bengkalis mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.10 Teknik Analisa Data

Analisis data ini akan dilakukan secara induktif, yakni penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari yang berbentuk khusus ke bentuk umum, atau penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai semua unsur-unsur penelitian yang tidak diperiksa atau diteliti dalam penelitian mengenai pelaksanaan program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Profil Kota Pekanbaru

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km² (<http://aldo-shandy.blogspot.com>).

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah

Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2016 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru menjadi 83 Kelurahan.

Kota pekanbaru berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Kab. Siak dan Kab. Kampar
- 2) Sebelah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan
- 3) Sebelah Timur : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Kab. Kampar

2.2 Profil Kecamatan Rumbai Pesisir

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan Kecamatan Pemekaran dari Kecamatan Rumbai, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Kecamatan Rumbai Pesisir dari 6 (Enam) Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kelurahan Meranti Pandak
- b. Kelurahan Limbungan
- c. Kelurahan Limbungan Sari
- d. Kelurahan Lembah Damai
- e. Kelurahan Tebing Tinggi Okura
- f. Kelurahan Limbungan Baru

Penyelenggaraan Pemerintah

Kecamatan Rumbai Pesisir mulai efektif pada awal Bulan Januari Tahun 2004.

2.3 Profil E-Warong

E-Warong merupakan sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh Kube Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube. Program E-Warong menjadi sebuah alternatif dan inovasi baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dapat meningkatkan

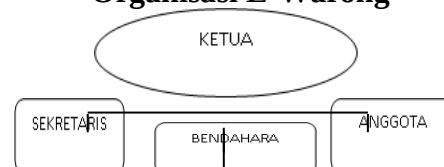
pelayanan dari segi kualitas, maupun kuantitas bantuan social (Wawancara. Ibu Chairani, S.STP, M.Si. 07 Agustus 2018). Fungsi dari diterapkannya program E-Warong adalah sebagai berikut:

1. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga.
2. Agen bank penyalur bantuan social non tunai.
3. Tempat pemasaran hasil produksi KUBE.
4. Tempat pelayanan koperasi simpan pinjam.

Struktur organisasi sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan E-Warong. Struktur organisasi E-Warong yaitu sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota
2. Sekretaris merangkap anggota
3. Bendahara merangkap anggota
4. Anggota.

Gambar I. Struktur Organisasi E-Warong



Sumber : E-Warong Kube Rumbai Pesisir, 2017

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017

Program E-Warong KUBE PKH adalah sarana yang didirikan dan dikelola secara gotong royong dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Program E-Warong dirancang sebagai tempat menjual bahan pangan pokok dan barang yang diproduksi KUBE dengan sistem transaksi non tunai menggunakan

jaringan internet (Wawancara. Heryanti, 07 agustus 2018).

Terkait dengan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan kelompok
Pertemuan Kelompok PKH dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) biasanya diadakan sebulan satu kali atau 3 bulan 2 kali.
2. Pendamping PKH melakukan pengawasan, memastikan bantuan tepat sasaran tepat jumlah dan tepat waktu. Memastikan agar bantuan dari Program tersebut tepat sasaran dan tepat waktu sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Berikut ini penjelasan mengenai teori Grindle, konteks kebijakan untuk menentukan keberhasilan suatu implemementasi kebijakan publik termasuk kebijakan Program Elektronik Warong KUBE PKH :

1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Pada pelaksanaannya suatu kebijakan publik, adanya memperhitungkan suatu kekuatan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan. Didalam Pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, terdapat beberapa kategori mengenai penjelasan indikator tersebut, antara lain:

a. Tidak ada kekuasaan dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Pada kategori ini dijelaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang mempengaruhi pengambilan tindakan

dalam pelaksanaan Program Elektronik Warong KUBE PKH, karena semua pihak yang terkait baik yang ada dipusat, kabupaten maupun kecamatan seperti pendamping merupakan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan Program Elektronik Warong. sedangkan segala perencanaan dan ketentuan mengenai Program Elektronik Warong KUBE PKH sudah ditetapkan dari pusat tinggal dilaksanakan.

b. Strategi dari aktor yang terlibat

Strategi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan agar mampu menyampaikan apa yang sebenarnya ingin diberikan oleh pelaksana kebijakan. Strategi tersebut merupakan pendekatan yang dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar baik untuk masyarakat ataupun untuk kepentingan pelaksana dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu siti maryati selaku pendamping pelaksanaan program elektronik warong KUBE di Kecamatan Rumbai Pesisir sebagai berikut:

“..Strategi yang dilakukan yaitu dengan diadakannya sosialisasi kepada setiap pendamping nantinya, dimana para pendamping merupakan tombak dari pelaksana Program Elektronik Warong KUBE PKH ini, dari pendamping kemudian dilakukan pensosialisasian kepada pihak Kecamatan, pihak aparat Desa, dan pihak peserta PKH itu sendiri”.

c. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Dalam implementasi Kebijakan yang pernah dibuat, pelaksanaannya tidak akan terlepas dari struktur organisasi atau instansi yang berkuasa. Dimana struktur dan karakteristik lembaga tersebut akan mempengaruhi

jalannya kebijakan tersebut secara baik. Program Elektronik Warong merupakan program yang diberikan pemerintahan pusat yaitu Departemen Sosial yang sebenarnya memiliki kekuasaan sebagai rezim yang berkuasa dalam hal peraturan seperti petunjuk pelaksana dan petunjuk teknisnya. Hanya saja daerah diberikan kewenangan melalui Otonomi Daerah untuk melaksanakan sendiri mengurus daerahnya dalam hal pengetasan kemiskinan.

Dengan dilakukan kerjasama dengan pihak yang terkait akan memudahkan pelaksanaan bantuan PKH ini dilapangan. Sedangkan karakteristik lembaga struktur organisasi di kecamatan rumbai pesisir di buat tidak secara formal, dibentuk hanya ditingkat pendamping saja seperti yang diungkapkan oleh Ibu siti maryati:

Memang ada struktur organisasi yang dibuat, tapi tidak secara formal hanya di lingkungan pendamping saja, seperti adanya Koordinator, Sekertaris, Bendahara...ya seperti itu (Wawancara. Ibu siti maryati. 07 agustus 2018).

2. Tingkat kepatuhan adanya respon dari pelaksana

Hal lain yang penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan serta masyarakat penerima kebijakan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa kategori yang akan dijelaskan dalam pembahasan, yaitu:

a. Respon atau daya tanggap pelaksana kebijakan terhadap fenomena kemiskinan dan tindakan untuk menangani kemiskinan

Respon dari pelaksana kebijakan dalam menanggapi fenomena kemiskinan yaitu harus diatasi baik oleh pelaksanaan kebijakan itu sendiri

maupun respon dari masyarakat penerima program elektronik warong ini merupakan bentuk bantuan atau kebijakan yang di peruntukan untuk kalangan KPM sebagaimana diungkapkan oleh Ibu chairani :

Kemiskinan merupakan masalah yang harus diatasi, artinya kita disini dalam Program Elektronik Warong lebih menekankan untuk sektor KPM, yang merupakan bantuan non-tunai kepada beberapa kelompok yang terdiri dari keluarga kurang mampu. Semoga program ini akan terus ada, karena masih banyak keluarga kurang mampu yang memerlukan bantuan. Melalui program KUBE apalagi sifatnya bukan individu tapi kelompok”.

3. Tingkat kepatuhan penerima kebijakan dalam melaksanakan Program Elektronik Warong KUBE PKH

Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh para penerima kebijakan disini yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peserta PKH yang sangat penting, mereka seharusnya tidak hanya mengandalkan dari kepedulian pemerintah tentang keadaan mereka dengan memberikan bantuan ini, akan tetapi mereka juga mau berubah kondisi mereka melalui kewajiban yang seharusnya mereka jalankan.

Jumlah elektronik warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru sebanyak 24 elektronik warong yang telah aktif dan beroperasi. E-Warong KUBE PKH Kota Pekanbaru berada di 24 kecamatan yang berdiri di masing- masing Kelurahan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada 1 (satu) e-warong, yakni di kecamatan rumbai Pesisir. E-Warong ini dipilih karena merupakan E-Warong yang belum aktif diterapkannya program elektronik warong KUBE PKH di Kota Pekanbaru.

Kemudian ukuran dasar atau kriteria dalam pembentukan E-Warong KUBE PKH Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warong Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yakni:

- a. Tempat untuk mendirikan E-Warong KUBE PKH harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa.
- b. Lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik.
- c. Melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) penerima manfaat yang berasal dari anggota KUBE peserta PKH dan penerima beras untuk rakyat sejahtera yang berasal dari 1 (satu) Kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) Kabupaten.
- d. Menggunakan rumah pengurus atau anggota KUBE Jasa.
- e. Pengurus atau anggota yang rumahnya menjadi tempat usaha E-Warong KUBE PKH tidak meminta sewa dan juga menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup atas kesediaan penggunaan rumah untuk E-Warong KUBE PKH.
- f. Melaksanakan transaksi bantuan sosial non tunai.
- g. Aksesibilitas jalan yang memadai.

3.2 Hambatan Eksternal Program Elektronik Warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Tahun 2017

a. Hambatan Internal

1) Terkendalanya Jaringan Internet

Tempatnya tidak terjangkau oleh jaringan internet, dan jaringan error sehingga mesin EDC tidak bisa digunakan.

2) listrik

Terkendalanya pada listrik yang sering padam dalam seminggu ada beberapa kali pemadaman.

Terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan E-Warong KUBE PKH Ketua E-Warong Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir memberikan jawaban sebagai berikut:

“Masalah dalam program E-Warong KUBE PKH tidak lain adalah kendala pada terkoneksi jaringan internet maupun listrik, sehingga menjadi penghambat untuk yang ingin berbelanja menggunakan kartu KSS atau Kartu elektronik, ada yang menunggu sehingga mengakibatkan antrian yang panjang, program E-Warong ini kan di canangkan dengan jumlah yang tidak tentu ada satu kecamatan 2 e-warongnya dan untuk kecamatan Rumbai Pesisir mendapatkan 3 E-Warong dan menampung jumlah yang cukup banyak bisa mencapai 500-700 orang, jadi terkadang membuat kita sebagai pemilik E-Warong merasakan kewalahan ketika melayaninya.” (Wawancara. 29 Agustus 2018).

b. Hambatan Eksternal

1) Kendala Teknis

Terkait dengan kendala teknis Ibu Siti Maryati selaku pendamping kecamatan Rumbai Pesisir memberikan jawaban sebagai berikut :

Seperti tidak adanya akses jalan yang memadai di kecamatan Rumbai Pesisir untuk ke tempat tujuan. Penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak yang menyebabkan hasil yang dicapai kurang maksimal. Kemudian yang ditempuh pendamping ke tempat pendampingan cukup jauh dan terkadang terjebak macet yang menyebabkan tertundanya pendampingan. Serta lokasi tempat pendampingan yang berada di gang-gang sempit dan kurangnya tanda atau nama gang yang menyulitkan

pendamping untuk mencari tempat pendampingan yang lokasinya berpindah pindah.

- 2) Belum dibentuknya Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS)

Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) belum terbentuk dikarenakan belum adanya tim dari Kementerian Sosial yang menunjuk lembaga atau organisasi terkait dalam pembentukan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) di Kota Pekanbaru. Fungsi dari Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) adalah wakil dari E-Warong sebagai penyedia bahan pangan. Dengan demikian pemasokan bahan pangan ke E-Warong KUBE PKH pada saat ini melalui pasar bebas yakni bebas mengambil dari mana saja bahan pangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya monopoli (keuntungan pribadi) karena bahan pangan tidak jelas berasal dari mana.

- 3) Akurasi data yang berkaitan dengan tidak semua masyarakat miskin yang terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hambatan selanjutnya dalam pelaksana program E-Warong KUBE PKH Kota Pekanbaru yaitu mengenai dana bantuan yang tidak keluar dalam rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai yang diberikan pemerintah setiap bulan.

“Saldo kosong, itu sudah tidak rahasia umum lagi, karena begini kita tidak bisa salahkan pemerintah, pendataan inikan double-double kemudian pihak Bank penyalur BRI punya kode etik tersendiri. Contoh salah dalam penulisan nama. Pendataan yang dilakukan mungkin terburu-buru sehingga nama antara di KTP dan KK tidak akurat, kemudian penulisan huruf

berubah dan berbeda” (Wawancara. Ibu heryanti, S. ST. 07 agustus 2018).

Hal tersebut dikarenakan adanya masalah administrasi sehubungan dengan identitas dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yakni antara penulisan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tidak sesuai. Karena dalam hal ini Bank Penyalur memiliki kode etik tersendiri.

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Pelaksanaan program e-warong KUBE PKH dilaksanakan pada bulan februari tahun 2017 mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH). Sehingga pelaksanaannya tidak akan lari dari peraturan tersebut. Kriteria lain yang terpenuhi yakni e-Warong KUBE PKH telah melaksanakan transaksi bantuan sosial non tunai. Sampai saat ini e-warong yang berdiri di Kota Pekanbaru dengan kecamatan dan kelurahan yang ada berjumlah 24 e-warong yang berdiri dan terdapat 5 e-warong yang di dalamnya yang belum aktif di jalankan salah satunya adalah Kecamatan Rumbai Pesisir.
2. Hambatan dalam pelaksanaan e-warong KUBE PKH di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru antara lain adalah hambatan Internal yaitu: *Pertama*, terkendalanya jaringan internet. *Kedua*, jaringan listrik. Dan hambatan Eksternal adalah : (1) Kendala Teknis. (2) belum dibentuknya Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS). (3) akurasi data yang berkaitan dengan

tidak semua masyarakat miskin yang terdaftar menjadi peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Program Keluarga Harapan (PKH).

Saran :

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran, adapun saran-saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya ada peran aktif pemerintah yang mana di wakili oleh Dinas Sosial untuk menjadi inisiator yang memberikan perhatian lebih dalam untuk pelaksanaan program e-warong KUBE PKH. Diharapkan Pemerintah dapat mengatasi permasalahan mengenai e-warong yang belum aktif dijalankan.
2. Sebaiknya dibentuk Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) untuk penyedia bahan pangan bagi PKH. Dan Menambah jumlah pendamping sesuai kebutuhan jumlah anggota PKH, karena terkait dengan jumlah kapasitas masyarakat yang cukup banyak. Serta diiharapkan Bank Penyalur BRI dapat menyelesaikan masalah pendanaan Penerima Keluarga Harapan (PKH) bantuan pangan non tunai. Agar tidak terjadi saldo dari Penerima Keluarga Harapan bantuan pangan non tunai yang kosong dan tidak lancar keluar dalam setiap bulannya. Karena dengan tidak keluarnya dana bantuan tersebut maka masyarakat KPM tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik. Pentingnya sikronisasi data antara yang dimiliki pemerintah pusat dengan data yang real di lapangan. Diharapkan para implementor pelaksana dapat mensinkronkan datanya kembali

agar tidak terjadi kesalahan serupa yang berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implemetasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah M. Syukur, 1986, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Kebijakan*, P4N: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Grindle, Marilee S., 1980. *Implementation as A Pilitical and Administrative Process*, Princetone University Press.
- Iskandar.2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*.Gaung Persada Press. Jakarta.
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kabijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Muslimin. 2002. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Bayu Media & UMM : Malang.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. BumiAksara: Jakarta.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Intermedia: Jakarta.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- <http://aldo-shandy.blogspot.com>12 Oktober 2018. 10.44 wib.
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan *E-Government*.
Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2016
Tentang Bantuan
Pengembangan Sarana Usaha
Melalui Elektronik Warung
Gotong Royong Kelompok
Usaha Bersama Program
Keluarga Harapan.